

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Diprovinsi Jawa Timur

Endah Ayuning Tiyas^a, Eni Wuryani^b
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Kampus Ketintang Jl Ketintang, Surabaya, Indoneseni

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data tersebut adalah data sekunder yang telah diperoleh dari laporan realisasi anggaran kota / kabupaten di Provinsi Jawa Timur periode 2013-2016 yang diperoleh dari situs web direktur keuangan umum pemerintah daerah periode 2013-2016. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja Modal. Sementara itu Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja Modal. dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Bagi Hasil; Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran; Belanja Modal.

The Effect Of PAD, DAU, DBH, And SILPA On The Allocation Of Capital Expenditure Budget (Studies In Districts And Cities In East Java Province)

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Local Revenues, General Allocation Fund, Profit Sharing Fund, and Surplus of Financing Budgeting to the Budget Allocation of Capital Expenditure on Cities/Districts in East Java. The data analysis technique has been done by using quantitative analysis. The data is the secondary data which has been obtained from budget realization statement of cities/districts in East Java province in 2013-2016 periods which has been obtained from website director general financial balance local government (DPKPD) in 2013-2016 periods. Based on the test result, it has been found that local revenue and General Allocation Fund have positive influence to the Allocation of Capital Expenditure. meanwhile Profit Sharing Fund does not have positive influence to the Allocation of Capital Expenditure. And Surplus of Financing Budgeting has negative influence to the Allocation of Capital Expenditure.

Keywords: Local Revenues; General Allocation Fund; Profit Sharing Fund; and Surplus Of Financing Budgeting; Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai diberlakukan pada tahun 1999 yang diharapkan dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan Negara Yovita & Utomo (2010). Era reformasi yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kekuatan baru dalam otonomi Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa masa sentralisasi pemerintah telah bergeser menjadi masa desentralisasi (Nuarisa, 2013). Pelaksanaan desentralisasi fiskal diwujudkan dengan pemberian otonomi. Dengan adanya otonomi daerah memberikan tantangan kepada daerah untuk mandiri secara fiskal Pheni Chalid (2005:15). Hal ini

yang mendorong suatu daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerahnya secara lebih efisien sebagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2002:139). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah khususnya masyarakat akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Kaunang et al., 2016).

Pada tahun 2013, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur di atas 50% dihabiskan untuk belanja pegawai. Kasus penyerapan anggaran terbesar yang disebabkan oleh tingginya belanja pegawai dan kurang optimalnya alokasi belanja modal juga terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah belanja pegawai rata-rata mencapai 65% dari total APBD. Besarnya anggaran untuk belanja pegawai akan menyulitkan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan. Idealnya belanja langsung seharusnya lebih tinggi karena menyangkut kesejahteraan masyarakat (Febriana, 2015). Namun di daerah kabupaten/kota di Jawa Timur justru sebaliknya. Teori keagenan merupakan hubungan antara *agent* dan *principal*. Dimana model keagenan dirancang oleh sistem yang melibatkan kedua pihak, sehingga dibutuhkan kontrak kerja antara manajemen dan pemilik perusahaan. Teori keagenan membahas tentang kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer untuk mengelola perusahaan (Permatasari & Mildawati, 2016). Maka perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yaitu kemungkinan pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal (Simanjutak, 2014). Teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mengetahui bahwa model kontraktual yang dapat mendorong agen agar bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal.

Penelitian yang dilakukan oleh Harianto & Hari (2007) menyatakan bahwa PAD sangat berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan Adiwiyana, (2011) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Fatmawati, (2013) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adiwiyana, (2011) menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah negatif. Adiwiyana, (2011) dan Febriana (2015) keduanya menyimpulkan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan Huda, (2015) menyatakan bahwa DBH berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Arif (2014) dan Subhan (2015) keduanya menyimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil arah hubungan antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DBH, dan SiLPA terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori keagenan menyatakan bahwa keagenan merupakan hubungan antara agen dan principal yang membahas tentang kesepakatan antara pemilik modal dengan manajer untuk mengelola perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mengetahui bahwa model kontraktual yang dapat mendorong agen agar bertindak bagi principal, saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan principal (Arsa & Setiawina, 2015). Prinsipal pendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Dalam kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen (Asmawanti et al., 2016). Dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal (Huda, 2015).

Pengembangan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Modal

Menurut Agency Theory agen dan prinsipal pada PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal. Dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibiayai dari belanja modal setiap tahunnya. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Ardhini, (2011). PAD digunakan untuk menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari. Semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, maka dapat dikatakan daerah tersebut memiliki pertumbuhan daerah yang baik. Jika ada peningkatan jumlah PAD, maka terjadi peningkatan pula pada jumlah belanja modal yang dikeluarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto et al., (2007) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal**Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Belanja Modal**

Menurut Agency Theory DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. DAU adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Aziz & Wulandari, 2014). DAU merupakan pendanaan bantuan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan yang diprioritaskan untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai Halim (2007:101). Sehingga DAU menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto et al., (2007) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Harianto & Adi (2007) menyatakan bahwa hasil variabel terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal dan semakin memperkuat untuk bukti empiris tersebut.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal**Dana Bagi Hasil Berpengaruh terhadap Belanja Modal**

Menurut Agency Theory hubungan antara agen dan prinsipal pada DBH dapat dilihat dari sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk mendapatkan dana pembangunan dan belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Sumber penerimaan DBH dari SDA yang berasal dari pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan, dan pertambangan panas bumi. Sehingga semakin tinggi DBH yang diterima oleh pemerintah daerah maka alokasi belanja modal juga akan semakin meningkat. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Subhan (2015). Terdapat dua jenis DBH yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam Wahyuni & Adi (2009). Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, (2015) menunjukkan bahwa hasil variabel Dana Bagi Hasil kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah hubungan yang negatif.

H3: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh terhadap Belanja Modal**

Menurut Agency Theory hubungan antara agen dan prinsipal pada SiLPA dapat dilihat dari pembiayaan dana SiLPA sudah dianggap lebih menguntungkan bagi pengadaan yang kompleks dan rumit. Maka dikatakan bahwa pengendalian kualitas terhadap output pengadaan menjadi hal sangat penting. SiLPA yang dapat digunakan dalam pembiayaan belanja daerah yaitu berdasarkan persetujuan oleh dewan legislatif. Di dalam *Agency Theory* bahwa anggota dewan dan Pemerintah Daerah ikut memanfaatkan pembiayaan sehingga pihak legislatif mendapatkan wewenangnya kembali (Amrozi & Riharjo 2013). SiLPA ditahun sebelumnya telah diidkasikan salah satu sumber pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yang realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja(Lumikis et al., 2014). Perhitungan SiLPA dapat dilihat dari total pemasukan daerah dikurangi total pengeluaran daerah(Simanjutak, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini., (2011) menyatakan bahwa hasil variabel menguatkan dimana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H4: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri banyak dituntut untuk menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, dan penampilan dari hasilnya. Data ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang akan disertai data statistik, karakteristik dan hubungan antar variabel (Arikunto, 2006:12). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang dapat diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui (website www.djpk.depkeu.go.id., 2013).

Penelitian ini terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dan realita dimana realisasi belanja pegawai lebih tinggi dibanding belanja modal yang terjadi sepanjang tahun 2013- 2016 di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dan kasus penyerapan anggaran tertinggi dengan rata-rata belanja pegawai mencapai 65 % dari total APBD terjadi pada tahun 2013 dan 2016.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang berjumlah 29 kabupaten dan 9 kota. Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah daerah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur yang totalnya 38 sampel. Dalam penelitian ini adapun jumlah kota yang tidak memiliki ketersediaan data sebanyak 2 kota. Jumlah data sampel yang terkena outliet yaitu 71 data.

Variabel penelitian dan definisi operasional

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan yang diperoleh dari sumber daerahnya sendiri yang telah dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan menggunakan undang-undang yang berlaku UU RI Nomor 33 Pemerintahan Daerah (2004). PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digunakan modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan(Yovita, 2011).Data peneliti diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur

$$PAD=HPD+RD+PLPD+LPS$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

HPD : Hasil Pajak Daerah
 RD : Retribusi Daerah
 PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah
 LPS : Lain-lain pendapatan yang Sah

Dana Alokasi Umum

Merupakan salah satu dana dari pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang telah dialokasikan kepada pemerintah berdasarkan angka persentase yang didasarkan atas daerah penghasil dan dapat mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak (SDA) Oviliza&Rasuli (2013).

$$\text{DBH} = \text{Bagi Hasil Pajak} + \text{Bukan Pajak}$$

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran oleh anggaran yang selama satu periode anggaran. Pada tahun anggaran sebelumnya SiLPA dapat mencakup beberapa penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain, pendapatan daerah yang sah, penerimaan pembiayaan, penghematan belanja (Nuarisa, 2013).

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus/Defisit Realisasi Anggaran} + \text{Pembiayaan Neto}$$

Belanja Modal

Belanja modal adalah total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Lestari & Tjatur (2015). Belanja modal untuk pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan} \\ & \text{dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan} \\ & \text{Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigrasi, dan} \\ & \text{Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} \end{aligned}$$

Teknik Analisis Data

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu regresi berganda. Metode regresi berganda ini dapat menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda ini dapat menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal.

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{DBH} + \beta_4 \text{SiLPA} + e$$

dimana :

Y = Belanja Modal
 α = Konstanta
 β = Slope atau koefisien regresi atau intersep
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
 DAU = Dana Alokasi Umum
 DBH = Dana Bagi Hasil
 SiLPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
 e = error

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	85	38.794,06	345.965,63	166.856,68	70.984,80
DAU	85	324.768,95	1417.603,99	79.2973,82	240.560,93
DBH	85	28.221,66	129.042,83	71.777,02	21.659,25
SILPA	85	1.671,33	435.429,16	187.956,72	94.503,25
Belanja_Modal	85	65.462,13	478.577,40	26.0845,92	105.329,84
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Data Diolah Penulis

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{ab}	Mean	,0000043
	Std. Deviation	67424210345,09
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,076
	Negative	-,075
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Diolah Penulis

Hasil uji non-parametrik K-S memiliki tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0.200 pada jumlah N dalam penelitian sebesar 85, lebih besar dari 0,050 maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal, sehingga model regresi memenuhi uji asumsi normalitas. Data awal dalam penelitian ini adalah sebesar 36 kota dan kabupaten dengan rentang waktu penelitian selama 4 tahun, sehingga ditemukan N sebesar 144. Setelah dilakukan uji outlier untuk menghapus data yang mengganggu penelitian ditemukan N sebesar 85.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Constant		
PAD	0,477	2,098

DAU	0,551	1,814
DBH	0,694	1,441
SILPA	0,693	1,444

Sumber: Data Diolah Penulis

Hasil perhitungan nilai Tolerance lebih dari 0,10 yang berarti ada/terdapat korelasi antar variabel independen dan juga hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan hal yang sama dimana tidak terdapat variabel independen dalam penelitian yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi sehingga tidak menyalahi asumsi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	TSig.
		B	Std. Error	Beta	
1	Constant	4722,242	,073,422		,66,007
	PAD	-,140	,087	-,256	-,111
	DAU	,019	,024	,120	,419
	DBH	,250	,236	,139	,293
	SILPA	-,013	,054	-,031	,816

Sumber: Data Diolah Penulis

Dalam hasil output Uji glejser diatas seharusnya setiap variabel memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05. Untuk keseluruhan variabel dalam tabel diatas didapatkan nilai signifikansi yang secara keseluruhan berada diatas tingkat signifikansi heterokedastisitas yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung Heterokedastisitas.

Uji Autokolerasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokolerasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-4285229625,07
Cases < Test Value	42
Cases >= Test Value	43
Total Cases	85
Number of Runs	40
Z	-,763
Asymp. Sig. (2-tailed)	,446

Sumber: Data Diolah Penulis

Dari hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu sebesar 0,446 yang berarti hipotesis nol gagal ditolak. Dengan demikian, data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	,768 ^a	,590	,570	69,090

Sumber: Data Diolah Penulis

Nilai Rsquare sebesar 0,590 atau sebesar 59% yang berarti bahwa sebesar 59% variabel independen dalam penelitian mampu mempengaruhi variabel modal kerja dalam penelitian. Sedangkan 41% mampu dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F

Model	Sumof Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5,50061	4	1,37515	28,809	,000 ^b
Residual	3,81866	80	4,77333		
Total	9,32	84			

Sumber: Data Diolah Penulis

Hasil uji F menunjukkan sebesar 28,809 dengan probabilitas signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05 (5%) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal, yang berarti dapat dikatakan bahwa variabel secara bersama–sama berpengaruh terhadap belanja modal.

Uji Persial (Uji T)

Tabel 8. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients	Standard Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	16,997	30,227		,562	,575
PAD	,622	,154	,419	4,045	,000
DAU	,223	,042	,509	5,283	,000
DBH	,034	,418	,007	,080	,936
SILPA	-,209	,096	-,187	-2,176	,033

Sumber: Data Diolah Penulis

Pada hasil pengujian T di atas didapatkan nilai t sign untuk variabel PAD sebesar 0,000 dengan arah koefisien positif sebesar 0,622. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pembahasan**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Hipotesis penelitian pertama (H₁) menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dibuktikan dengan hasil pengujian regresi yang didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 berada jauh dibawah tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05 dan nilai koefisien regresi dari persamaan

pertama tersebut sebesar 0,622. Berdasarkan hasil tersebut semakin tinggi PAD maka semakin meningkat pula Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat pada sampel data Kabupaten Bojonegoro yang mengalami peningkatan PAD pada tahun 2013-2016 sebesar 41%. Alokasi belanja modal pada Kabupaten Bojonegoro meningkat pula sebesar 90%. Hal tersebut dikarenakan apabila suatu pendapatan daerah meningkat maka kesempatan untuk mengalokasikan anggaran terhadap belanja modal daerah juga akan meningkat. Hasil penelitian ini mendukung Agency Theory yang menjelaskan bahwa masyarakat bersedia membayar pajak sebagai salah satu sumber PAD kepada pemerintah daerah dengan harapan PAD tersebut dapat dikelola secara tepat melalui belanja modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto & Yustikasari (2007) menyatakan bahwa hasil variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hipotesis penelitian kedua (H_2) menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dibuktikan dengan hasil pengujian regresi yang didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 berada jauh di bawah tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 dan nilai koefisien regresi dari persamaan pertama tersebut sebesar 0,223. Berdasarkan hasil tersebut semakin tinggi DAU maka semakin meningkat pula Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat pada sampel data Kota Pasuruan yang mengalami peningkatan DAU pada tahun 2013-2016 sebesar 20% dan mengalami meningkat pula pada alokasi belanja modal sebesar 65%. Hal tersebut dikarenakan unsur dari alokasi belanjayaitu gaji pegawai negeri sipil Kota Pasuruan pada tahun 2013-2016 meningkat dan unsur dari celah fiskal yaitu kebutuhan daerah dan potensi di Kota Pasuruan ikut meningkat maka. Hasil penelitian ini mendukung Agency Theory pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah melalui penyerahan alokasi dana APBN berupa DAU untuk membantu belanja modal pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto & Yustikasari (2007) menyatakan bahwa hasil variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian empiris oleh Harianto & Adi (2007) menyatakan bahwa hasil variabel terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Hipotesis penelitian ketiga (H_3) menunjukkan bahwa variabel DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dibuktikan dengan hasil pengujian regresi yang didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,946 berada jauh di atas tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 dan nilai koefisien regresi dari persamaan pertama tersebut sebesar 0,034. Sebagai contoh DBH yang berasal dari SDA antara kota Surabaya dengan kabupaten Magetan. Kota Surabaya mendapat dana sebesar 16.587.434.797,00 dari pemerintah pusat, sedangkan kabupaten Magetan mendapatkan 18.221.500.917,00 hanya terpaut dua milyarsaja. Sedangkan perbandingan belanja modal antara kota Surabaya dan kabupaten Magetan terpaut sangat jauh dimana kabupaten Magetan hanya mencapai 190.161.286.106,00 dan kota Surabaya mencapai 2.517.618.139.614,00. Hasil penelitian ini mendukung Agency Theory pemerintah pusat mentransfer dana APBN berupa DBH untuk diberikan kepada pemerintahan daerah agar dapat digunakan untuk belanja modal atau memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Dengan demikian besaran DBH tidak dapat dijadikan acuan untuk melihat besaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian (Mentayani, 2015) yang menyatakan bahwa DBH pajak dan DBH sumberdaya alam tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. DBH sendiri merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Hipotesis penelitian keempat (H_4) menunjukkan bahwa variabel SiLPA berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Dibuktikan dengan hasil pengujian regresi yang didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,033 berada di bawah tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 dan nilai koefisien regresi dari persamaan pertama tersebut sebesar -0,209. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dilihat dari sampel data Kabupaten Bangkalan tahun 2013- 2014 terjadi penurunan pada SiLPA sebesar 53% dan mengalami peningkatan pada Alokasi Belanja Modal sebesar 11%. Terjadi pula di Jember pada tahun 2013-2014 yang mengalami peningkatan SiLPA sebesar 25% dan terjadi penurunan Alokasi Belanja Modal sebesar 11%. Hasil penelitian ini mendukung Agency Theory pemerintah pusat menyalurkan alokasi dana SiLPA kepada pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal atau pengeluaran pembiayaan daerah agar dapat menunjang program program pembangunan di daerah. Hal tersebut karena SiLPA tidak selalu ada pada laporan APBD, SiLPA hanya terjadi jika ada surplus. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nordiawan, (2006) yang menyatakan bahwa hasil variabel SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan dalam penelitian kali ini SiLPA memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa *Pendapatan Asli Daerah* berpengaruh positif terhadap belanja modal. Mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. *Dana Alokasi Umum* berpengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi belanja modal juga meningkat. *Dana Bagi Hasil* tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana bagi hasil sendiri merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan. *Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran* berpengaruh negatif terhadap belanja modal. SiLPA sendiri memang merupakan indikator yang dapat menggambarkan seberapa efisien dana yang dikeluarkan untuk anggaran belanja modal.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yakni Penelitian ini memiliki tingkat variabilitas yang cukup tinggi pada pemilihan variabel independennya yaitu sebesar 59% dan sisanya sebesar 41% merupakan variabel yang diharapkan untuk dapat dipenuhi oleh peneliti selanjutnya dengan mencoba menggunakannya pada objek penelitian yang lain seperti di Jawa Tengah ataupun Jawa Barat dan lainnya. Untuk Bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bahwa efisiensi pengalokasian belanja modal sangat perlu direncanakan matang – matang agar dapat tepat sasaran dalam penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiyan, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *E-Jurnal Ekonomi*, 5(2), 1-19.
- Amrozi, A. I., & Riharjo, I. B. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu*, 2(9), 1–20.
- Ardhini. (2011). Pengaruh Rasio keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenaan. *Journal Accounting*, 3(2), 147-155.
- Arif, Purnama. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Accounting*, 2(1), 132-142.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta.
- Arsa, K., & Setiawina, N. D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006-2013. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 20(2), 104–112.

- Asmawanti, D., Elvandari, N., & Baihaqi. (2016). Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 33–50.
- Aziz, A., & Wulandari, W. (2014). Analisis Pengaruh Equalization Grant, Sumber Kemandirian Fiskal, Sumber Pembiayaan Defisit dan Faktor Penyerap Fasilitas Publik Terhadap Belanja Modal Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1, 1–20.
- Darwanto, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1-19.
- Fatmawati, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Langsung. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2(7), 1-19.
- Febriana, I. S. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9), 1–22.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, D., & Hari Adi, P. (2007). Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita. *Journal Accounting*, 3(2), 1–26.
- Huda, A. S. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Accounting*, 152–166.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial. *Jurnal of Financial Economics*.
- Kaunang, C. E., Naukoko, A. T., & Londa, A. T. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 355–365.
- Lestari, S. A., & Tjatur, H. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal Daerah Pada Pemerintahan Kota Di Jawa Barat Tahun 2011-2013. *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3383–3392.
- Lumikis, R., Saerang, D., & Ilat, V. (2015). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 6, 52–63.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mentayani, I. (2015). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Perkapita pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8(1): 1-18.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 89–95.
- Oviliza Haryuli, M. Rasuli, D. S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal. *E-Jurnal Ekonomi*, 53(9), 1689–1699.
- Permatasari, I., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(Akuntansi), 1–17.
- Pheni Chalid. (2005). *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Simanjutak, T. H. (2014). Analisis Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Fiskal Daerah dan Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah Serta Kesejahteraan Hidup Masyarakat Jawa Timur. *3rd Economics & Business Research Festival*, 3, 829–841.
- Subhan. (2015). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tax Effort. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh*, 7(1), 1–26.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2004).

- Wahyuni & Priyo Hari Adi. (2009). Analisis pertumbuhan dan kontribusi dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah. *Jurnal Ekonomi*, 3(32), 1–23.
- website www.djpk.depkeu.go.id. (2013). website www.djpk.depkeu.go.id.
- Yovita, F. M., & Utomo, D. C. (2010). Pengelolaan Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 1-39.